



**PERATURAN KALURAHAN KEMEJING
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN KEMEJING
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KEMEJING KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



LURAH KEMEJING
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMEJING
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMEJING
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEMEJING

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2024;
21. Peraturan Desa Kemejing Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Kemejing Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2023 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMEJING
Dan
LURAH KEMEJING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMEJING TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemejing Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.679.098.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.697.805.361,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.706.761,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.706.761,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.706.761,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kemejing.

Ditetapkan di : Kemejing

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Kemejing

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Carik



WISTI AGNITA PUTRANTIA

LEMBARAN KALURAHAN KEMEJING NOMOR 10 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KEMEJING
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMEJING
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.055.900,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.523.442.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.537.998.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	876.047.676,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.126.124.422,00	
5.3.	Belanja Modal	510.823.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.615.001,00	
	JUMLAH BELANJA	2.565.610.399,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.611.799,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.611.799,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.611.799,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	27.611.799,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemejing, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMEJING
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.055.900,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.523.442.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.537.998.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.109.953.248,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	973.009.321,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	722.145.000,00	ADD, PBK
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	722.145.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.054.896,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.054.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	30.396.545,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.396.545,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.382.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.382.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.053.100,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.053.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.130.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.130.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.377.400,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	1.125.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.125.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.900.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.900.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.352.400,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.352.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.627.732,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.434.434,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.434.434,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.193.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.193.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	420.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	580.298,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.298,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.013.795,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.746.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.746.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.836.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.836.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.636.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.636.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.417.500,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.417.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.498.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.498.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.464.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	56.151.300,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.201.300,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.950.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.237.500,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.237.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.351.995,00	ADD, DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.351.995,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.380.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.295.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	925.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	925.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.022.364.700,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.202.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.640.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	3.912.500,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.912.500,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	20.650.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	236.667.900,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.715.400,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.715.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	135.628.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.628.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.685.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.685.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.919.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.969.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.950.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	31.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	23.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	477.702.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.449.500,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.500,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	4.180.000,00	PBH
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	299.585.800,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	297.285.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	168.487.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	166.187.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	3.000.000,00	DLL
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	254.293.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	226.339.500,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.339.500,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	21.516.500,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.516.500,00	
2.4.91		Pembenan stimulan jamban sehat	6.437.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.437.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.250.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	2.250.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.248.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.248.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.248.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>130.330.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.385.700,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.000.000,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.210.700,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.700,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	13.175.000,00	DDS
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	13.175.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	77.005.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.390.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.390.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.540.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	33.075.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.075.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.055.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.125.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.930.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.885.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.165.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.165.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.660.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.460.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>250.346.750,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.700.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	3.700.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	238.933.250,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	162.504.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.504.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.098.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.098.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	74.330.750,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.330.750,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.713.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.713.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.713.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>52.615.001,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.015.001,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.015.001,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.015.001,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.565.610.399,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(27.611.799,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.611.799,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	27.611.799,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemejing, 29 Desember 2023
 LURAH
 LURAH KEMEJING
 SUGIYARTO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KEMEJING
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀

Alamat : Sulur I, Kemejing, Semin, Gunungkidul, D.I Yogyakarta 55854 Email : pen-deskmtj@gmail.com
Website : www.kemejing-semin.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMEJING
DAN
LURAH KEMEJING
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KEMEJING
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMEJING
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : 10 Tahun 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemejing menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kemejing tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 menjadi Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini di buat di Kalurahan Kemejing dan di tandatangi bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemejing dan Lurah Kemejing.

Badan Permusyawaratan Kalurahan



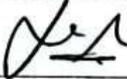
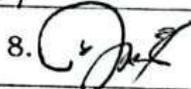
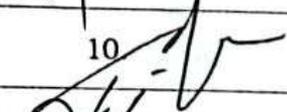
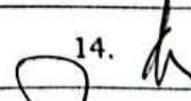
KARNET SUKIRDI, S.Pd.I

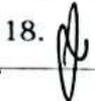
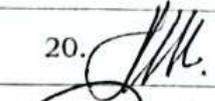
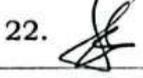
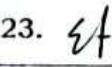
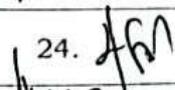
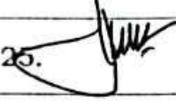
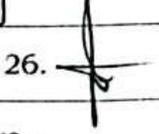
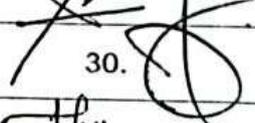
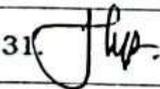
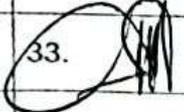
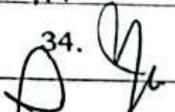
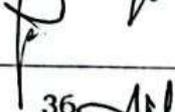
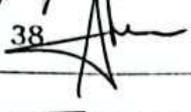


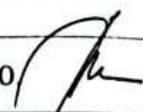
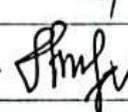
WARTO

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Rabu, 27 Desember 2023
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Balai Kalurahan Kemejing
 Acara : Persetujuan dan Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal
 Tentang Rancangan APBDkal TA. 2024.

NO.	NAMA	UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.	Sudarto	Pamong	1. 
2.	Sudarmi	LPMKA	2. 
3.	PONCO MURAHARJO	PAMKNE	3. 
4.	Rahmat Ali	Pamong	4. 
5.	Pormini	RT	5. 
6.	Narwi	RWA	6. 
7.	Lagiman	Pamong	7. 
8.	TUMARU	TP.PKK	8. 
9.	Subandi	Bamuskel	9. 
10.	Ismail Falmi	Pamong	10. 
11.	ARTIS WAYANTI	BAMUSKAL	11. 
12.	Didi.S. Dugolo	Kar Umum	12. 
13.	Slamets	Bamuskel	13. 
14.	Diyakoko	BABANSU	14. 
15.	Suti miu	Jm	15. 
16.	Cupina	Pamong	16. 
17.	Suhard	Bamuskal	17. 

NO.	NAMA	UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
18.	P. Pracojo	Gapoktan	18. 
19.	Hendriyanto	RT	19. 
20.	Ginjar tri u.	IPMKAL	20. 
21.	Rahmawati S.	Pentak	21. 
22.	Sukarni	UKM	22. 
23.	Welas Asih	KADER	23. 
24.	Santoso	Pemuda	24. 
25.	Rusman	PAMONG	25. 
26.	Rosma	Masyrakat	26. 
27.	SAMPAN	LINMAS	27. 
28.	Mugmur	Ko. Gubuk ^{Dukuh} -1	28. 
29.	Jayadi. Leryanto	Dukuh	29. 
30.	Feloni Joko	RT	30. 
31.	Marimin	Dukuh	31. 
32.	Dwi Bertanto	Dukuh	32. 
33.	Nugroho	Dukuh	33. 
34.	Sugi yanti	Tangkil 1	34. 
35.	Ariz y	Tangkil	35. 
36.	Wish Agusta P	Kenejing	36. 
37.	Ahmadi	Kaur Pangripta	37. 
38.	ADIKA CHANDRA K	PAMONG	38. 
39.	Warseno	Dukuh	39. 

NO.	NAMA	UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
40.	Tuliano	Deputi Keresmas	40. 
41.	Dwi Jayanti Afrani	Bamuskal	41. 
42.			42.
43.			43.
44.			44.
45.			45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			49.
50.			50.

Pelaksana Kegiatan


(AHMADI)

